

**PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA, FILSAFAT, PSIKOLOGI
DAN SOSIAL STUDY KASUS PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN X
JAKARTA SELATAN**

Dr. A Saefurrijal¹, Dr. Faiz Karim F², Arsita Pratiwi³, Zakia Hary Nisa¹

achmad.saefurrijal433@gmail.com¹, faizkarim@uninus.ac.id², larsyta@gmail.com³,
zakia.11tugas@gmail.com⁴

Universitas Islam Nusantara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa, mengapa, dan bagaimana pengelolaan pendidikan berbasis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi study kasus pada sekolah tinggi ilmu Kesehatan x Jakarta selatan. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa pengelolaan pendidikan adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya pendidikan yang berbasis agama berarti berpijak pada ajaran Tuhan yang mewajibkan pengaturan yang menyeluruh, dengan cara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang tepat dan akurat; berbasis filsafat berarti berpijak pada kajian alam dan makna kehidupan yang realistis, dengan cara berpikir rasional, natural ilmiah, harmoni, dan kritis; berbasis psikologi berarti berpijak pada kajian ilmiah pikiran dan perilaku manusia yang menyeluruh, dengan cara introspeksi, eksperimen, dan komparasi; dan berbasis sosiologi berarti berpijak pada kajian ilmiah kemasyarakatan yang menghendaki kemajuan, dengan cara pandang masyarakat yang progresif, rasional, dan sadar.

Kata Kunci: Pengelolaan Pendidikan; Agama; Filsafat; Psikologi; Sosiologi

**EDUCATION MANAGEMENT BASED ON RELIGION, PHILOSOPHY,
PSYCHOLOGY, AND SOCIOLOGY STUDY CASE AT HIGH SCHOOL OF HEALTH
SCIENCES X SOUTH JAKARTA**

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze what, why, and how of education management based on religion, philosophy, psychology, and sociology study case at high school of health sciences x south Jakarta. From this research, it was concluded that education management is planning, implementing, and supervising educational resources which are based on religion means based on God's teachings that command comprehensive arrangements, by means of proper and accurate planning, implementation, and supervision; based on philosophy means based on a realistic study of nature and the meaning of life, by thinking rationally, naturally scientifically, harmoniously, and critically; based on psychology means based on a comprehensive scientific study of the human mind and behavior, by means of introspection, experimentation, and comparison; and based on sociology means based on social scientific studies that require progress, with a progressive, rational, and conscious society perspective.

Keywords: Education Management; Religion; Philosophy; Psychology; Sociology

PENDAHULUAN

Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang diberikan tugas untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional harus menjalankan perannya dengan baik. Dalam menjalankan peran sebagai lembaga pendidikan, sekolah harus dikelola dengan baik agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dengan optimal. Pengelolaan sekolah yang tidak profesional dapat menghambat proses pendidikan yang sedang berlangsung dan dapat menghambat langkah sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal.

Pendidikan merupakan amanat para pendiri bangsa yang memiliki dasar yang sangat kuat dalam dasar Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam satu bab dan dua pasal tersendiri. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (UUD NRI'45), BAB XIII tentang pendidikan menyatakan pada Pasal 31 ayat satu "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, ayat 2 (dua) "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang", dan Pasal 32 "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional". Pendidikan dan kebudayaan adalah hak setiap warga negara dan kewajiban suatu pemerintah untuk mengusahakan, menyelenggarakan, dan memajukannya sebagai pengemban amanat negara untuk melayani warganya (public service obligation) dalam rangka melindungi, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI '45.

Filsafat pendidikan adalah muara ide dari berbagai kebutuhan utama pendidikan seperti model pembelajaran dan berbagai aspek lain yang dibutuhkan untuk

melanjutkan saga keilmuan pendidikan. Seperti filsafat pada umumnya, filsafat ini juga mempertanyakan berbagai kemungkinan yang telah ada lalu mempertanyakan kebenarannya agar dapat memutuskan kebenaran baru dalam menggiati keilmuan ini.

Landasan filosofis pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan deduksi atau dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum yang diajarkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Terdapat hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-cabang filsafat umum terhadap gagasan-gagasan pendidikan.

Psikologi pendidikan merupakan pembelajaran yang sistematis tentang proses-proses dan faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku yang baik (Novianti, 2015). Menurut Syah dalam (Novianti, 2015) bahwa psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin ilmu psikologi yang menyelidiki masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia didunia pendidikan yang meliputi studi sistematis tentang proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan menurut pendapat (Siti Rosmayanti, Ella Dewi Latifah, 2020) menyatakan bahwa sebagai sebuah ilmu, tujuan psikologi Pendidikan adalah memberi kita pengetahuan riset yang dapat secara efektif diaplikasikan untuk situasi mengajar. Upaya menciptakan proses pembelajaran yang bermutu dan berhasil, dapat dilakukan dengan mewujudkan perilaku psikologis proses pengajaran dan pembelajaran antara pendidik dan peserta didik dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan

manusia berupa pendidikan juga tak terlepas dari factor psikologis. Faktor psikologis menjadi landasan dalam pendidikan dikarenakan kegiatan Pendidikan melibatkan kejiwaan manusia. Landasan psikologis menjadi penting dikarenakan Pendidikan umumnya berkaitan erat dengan pemahaman dan penghayatan akan perkembangan manusia, khususnya proses belajar mengajar. Landasan psikologi tentu harus memiliki pedoman. Landasan atau prinsip pendidikan adalah ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman atau pegangan dalam melaksanakan pendidikan agar tujuannya tercapai dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Landasan yang dianut dalam pendidikan berpedoman pada azas yang dibuat oleh Komisi Pembaharuan Pendidikan, salah satu asa yang pertama adalah ide dari Ki Hajar Dewantara yaitu : i ng Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani. Landasan dan Asas yang diberlakukan dalam dunia pendidikan memiliki fungsi yang merupakan serangkaian tugas atau misi yang diemban. Fungsi pendidikan itu sendiri adalah menyiapkan sebagai manusia, menyiapkan tenaga kerja dan menyiapkan warga negara yang baik.

Pendidikan di Indonesia dimaknai sebagai upaya untuk mengembangkan segenap potensi individu yang diarahkan dalam rangka peningkatan daya saing bangsa dan upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan tujuan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sosiologi Pendidikan mengkaji masyarakat yang

didalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial dalam hubungannya dengan Pendidikan. Dalam hubungan ini dapat dilihat bagaimana peran masyarakat dalam mempengaruhi suatu Pendidikan. Juga sebaliknya, dengan sebagaimana Pendidikan mempengaruhi masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, yang selalu berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. Kajian sosiologi pendidikan menekankan implikasi dan akibat sosial dari pendidikan dan memandang masalah-masalah pendidikan dari sudut totalitas sosial kebudayaan, politik dan ekonomisnya bagi masyarakat. Apabila psikologi pendidikan memandang gejala pendidikan dari konteks perilaku dan perkembangan pribadi, maka sosiologi pendidikan memandang gejala pendidikan sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat.

Pelaksanaan Pasal 31 ayat dua UUD NRI '45, tersusunlah Undang-Undang 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN 20/2003) yang saat ini berlaku. Dalam UUSPN20/2003 ini, pengertian, fungsi, dan tujuan Diknas dinyatakan secara tegas. Perihal pengertiannya, Pasal 3 1 ayat satu menegaskan "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan suatu potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".Terkait fungsi dan tujuannya, Pasal 3 menegaskan "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Fungsi dan tujuan Diknas dalam UUD NRI '45 dan UUSPN 20/2003

tersebut sejalan dengan gagasan inti tokoh pendidikan nasional sekaligus salah satu penyusun UUD NRI '45 yang tergabung dalam Panitia Sembilan, yaitu Ki Hajar Dewantara (1977), yang memaknai bahwa pendidikan secara umum adalah “daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual dan tubuh anak); dalam Taman Siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya”.¹ Ditegaskan lagi pada Pasal 1 ayat (16) UUSPN 20/2003 “Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat”. Untuk pencapaian tujuan Diknas tersebut, Pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai kriteria minimal yang wajib dipenuhi dan dilampaui pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Pasal 35 UUSPN 20/2003 menetapkan bahwa SNP meliputi delapan aspek, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. SNP diatur lebih rinci dalam PP 19/2005 tentang SNP yang selanjutnya diubah dengan PP 57/2021.

Menurut BSNP, delapan standar dikembangkan dan ditetapkan untuk mengukur, mengevaluasi, menilai mutu pendidikan, yang hasilnya akan menjadi acuan untuk menyusun program peningkatan mutu pendidikan. Memperhatikan suatu kondisi pendidikan

nasional yang sangat beragam, SNP dipastikan bukan untuk penyeragaman tetapi justru untuk mengakomodir berbagai keberagaman, supaya pendidikan tetap dalam standar mutu sehingga setiap satuan pendidikan memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan bermutu.² Dalam PP 19/2005 tentang SNP yang kemudian diubah dengan PP 57/2021 tersebut dijelaskan bahwa: (a) Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu; (b) Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan; (c) Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; (d) Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan; (e) Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (f) Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota,

provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan; (g) Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan (h) Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.³

Delapan SNP standar pengelolaan termasuk standar yang sangat menentukan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Pasal 27 ayat (1) PP 57/2021 menyatakan “Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif”. Standar Pengelolaan meliputi Standar pengelolaan oleh satuan Pendidikan; Standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah; dan Standar pengelolaan oleh Pemerintah.⁴ Dengan demikian, pengelolaan pendidikan di Indonesia harus mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau oleh Penyelenggara Pendidikan untuk instansi swasta. Misalnya, dalam pengelolaan pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan menengah harus mengacu pada Permendiknas 19/2007 tentang suatu Standar Pengelolaan Pendidikan.⁵ Pada Pasal 1 ayat (1) “Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional” Dengan adanya berbagai payung regulasi beserta pedoman teknisnya diharapkan pengelolaan pendidikan semakin berkualitas sehingga tujuan Diknas segera terwujud. Sebab, Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu bangsa semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusianya yang memiliki daya saing lokal,

regional dan global dalam berbagai profesi, seperti para intelektual, politisi, ilmuwan, negarawan, guru dan profesi lainnya.⁶ Oleh karena itu, poin penting pengelolaan pendidikan oleh pemerintah dari masa ke masa mengacu pada peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang pendidikan. Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai inovasi dalam sistem dan proses pendidikan nasional. Sayangnya, ternyata masalah pendidikan masih ada akibat dari perkembangan dan tuntutan zaman. Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud,⁷ mengakui masih adanya beberapa permasalahan dalam pengelolaan pendidikan, antara lain: (a) Pemerataan pendidikan, seperti masalah belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana di daerah-daerah terutama di daerah terpencil; (b) Relevansi pendidikan, seperti belum relevannya kurikulum dengan tuntutan dunia kerja dan kemajuan IT, meskipun pemerintah telah meluncurkan program STEAM (Sains, Teknologi, Engineering, Art and Mathematic) untuk pembelajaran daring, selain luring; (c) Kualitas pendidikan, seperti masih rendahnya kualitas pendidikan Indonesia, sebagaimana dirilis *The Guardian* bahwa Indonesia menempati urutan ke 57 dari total 65 negara, dimana peringkat tersebut menentukan negara mana yang terbaik dari segi membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. Padahal, pemerintah telah meluncurkan beragam program strategis seperti Gerakan Literasi Nasional, Pendidikan dengan pendekatan saintifik, *discovery learning*, *problem base solving* dalam pembelajaran; (d) Efisiensi pendidikan, seperti masih terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan anggaran pendidikan, tanpa memperhatikan skala prioritas yang tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan; dan (e) Tenaga Pendidik dan Kependidikan (Dikendik), seperti masih kurangnya Dikendik yang

KKI, CPNS dan PNS/ASN terkait dengan perubahan kurikulum dari KTSP ke K13, dari K13 ke K21 (merdeka belajar).

Regulasi dan aturan teknisnya telah jelas dan anggaranpun tersedia 20 persen dari APBN, yakni sebesar 550 triliun. Mengacu pada gagasan Edward Sallis,⁸ kesuksesan pengelolaan pendidikan sangat tergantung pada kesadaran semua pihak. Lembaga pendidikan dituntut untuk mengembangkan pendekatan mereka sendiri terhadap kualitas, dan perlu menunjukkan kepada publik bahwa mereka juga dapat memberikan layanan berkualitas yang konsisten, ‘This new consciousness of quality has now reached education; educational institutions are being required to develop their own approaches to quality, and need to demonstrate publicly that they too can deliver a consistent quality service’). Berdasarkan fakta-fakta di atas, masalah demi masalah pengelolaan pendidikan memang akan selalu adadan harus dicarikan solusinya satu persatu secara tepat, tidak dibiarkan berlarut-larut sampai menumpuk. Salah satu solusinya, selain berpedoman pada konsep dan teori para ahli, para pihak yang berkepentingan perlu dimunculkan kesadarannya akan ajaran / kaidah / prinsip kebenaran yang mereka anut yang bersumber dari agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi.

Dalam persepektif Islam, pemahaman mengenai misi juga dapat dipahami dalam Q.S An – Nahl pada Ayat 125, yang berbunyi : Siti Mas’amah, Ujang Nurjaman, Faiz Karim Fatkhulloh :

لِيُؤْتِيَهُم مِّنْ رَّبِّهِمْ أَجْرًا خَيْرًا مِّمَّ الَّذِي كَانُوا كَسِبُوا

لِيُؤْتِيَهُم مِّنْ رَّبِّهِمْ أَجْرًا خَيْرًا مِّمَّ الَّذِي كَانُوا كَسِبُوا

لِيُؤْتِيَهُم مِّنْ رَّبِّهِمْ أَجْرًا خَيْرًا مِّمَّ الَّذِي كَانُوا كَسِبُوا

Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Berdasarkan ayat tersebut, misi pendidikan Islam harus mengandung ide – ide pokok yang mengedepankan pemberian pengajaran yang baik dan nilai – nilai etika, sopan santun yang bukan hanya dilakukan oleh peserta didik terhadap pendidik, tetapi juga sebaliknya. Oleh karena itu, pada perspektif pendidikan Islam dalam memahami misi dapat dikatakan sama dengan orientasi misi pada bidang pendidikan nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Dari orientasi misi pendidikan yang menekankan pada statement – statement misi yang bernilai non – profit, pada perspektif pendidikan Islam ditambahkan nilai – nilai Islam dalam statement misi yang ingin dilaksanakan oleh lembaga pendidikan Isla

Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pembangunan dibidang pendidikan, baik dalam peraturan dan perundang-undangan maupun dalam perbaikan infrastruktur, sudah cukup menggembirakan dan dapat memberi penguatan terhadap asas dan landasan pendidikan nasional, demikian halnya dalam perbaikan manajemen pendidikan, yang dulunya diterapkan manajemen pendidikan sentralisasi yang ternyata kebijakan pemerintah ini menjadikan proses demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan kurang terdorong dan terakomodasi dalam pelaksanaan pendidikan nasional, sehingga dengan adanya reformasi dalam kebijakan

pendidikan di Indonesia ikut memengaruhi

system manajemen tersebut dari

لِيُؤْتِيَهُم مِّنْ رَّبِّهِمْ أَجْرًا خَيْرًا مِّمَّ الَّذِي كَانُوا كَسِبُوا

عَ َظَّ se n
n i
t
r b
a e
l r
i t
s u
a j
s u
i a
(n
t
e u
r n
p t
u u
s k
a
t
)
k
e
d
e
s
e
n
t
r
a
l
i
s
a
s
i
)
P
e
n
e
l
i
t
i
a
n

i

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya

mendeskrripsikan dan menganalisis apa (what), mengapa (why), dan bagaimana (how) pengelolaan pendidikan berbasis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi

study kasus pada Sekola Tinggi Ilmu Kesehatan X Jakarta Selatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, data dikumpulkan denganteknik library research, dan data dianalisis denganteknikcontent analysisterkait pengelolaan pendidikan berbasis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi.^{9, 10}

PEMBAHASAN

Pengelolaan Pendidikan Secara etimologis, kata 'pengelolaan' dalam bahasa Inggris disebut management yang menurut Oxford Learner's Dictionary berarti "the activity of running and controlling a business or similar", dan kata 'pendidikan' disebut education yang berarti "a process of teaching, training and learning, especially in schools, colleges or universities, to improve knowledge and develop skills".^{11, 12} Singkatnya, pengelolaan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan dan pengawasan proses pengajaran, pelatihan, dan pembelajaran. Muhammad Al Mighwar menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan di Indonesia mencakup fungsi- fungsi POAC the 6 M's / 7 komponen pendidikan. Fungsi-fungsi ini disintesiskannya menjaditiga fungsi perencanaan / planning, pelaksanaan (pengorganisasian / organizing dan penggerakan / actuating) dan pengawasan / evaluatinglima sumber daya / komponen pendidikan, yaitu: (1) Man and Women / Diktendik dan Kesiswaan; (2) Materials and Methods / Kurikulum dan Program Pengajaran; (3) Machines/sarana dan prasarana; (4) Money/Keuangan; (5) Markets / Hubungan Masyarakat dan Layanan Khusus. Detailnya: (1) Perencanaan meliputi: (a) Penyusunan Strategi, yang mencakup Visi, Misi, dan

Tujuan; dan (b) Penyusunan Kebijakan, yang mencakup Rencana Kerja (Jangka Panjang, Jangka Menengah, Jangka Pendek), Pedoman-Pedoman Komponen Pendidikan (Kesiswaan, Kurikulum dan Program Pengajaran, Diktendik, Sarpras, Pembiayaan, Humas/Kemitraan dan Layanan Khusus);(2) Pelaksanaan meliputi (a) Pengorganisasian, yang mencakup Desain struktur organisasi formal beserta tupoksinya, dan Dinamisasi organisasi formal-nonformal-informal; dan (b) Penggerakan Komponen Pendidikan, yang mencakup Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, Motivasi, Penilaian, Pengembangan, Kompensasi, dan Komunikasi efektif; dan (3) Pengawasan meliputi: (1) Pengawasan Bertahap, yang mencakup Pemantauan, Supervisi, Evaluasi, Pelaporan, Tindak Lanjut; dan (2) Pengawasan Menyeluruh, yang mencakup Evaluasi Diri, dan Akreditasi / Penilaian Khusus.

DAFTAR PUSTAKA

1. Edward Sallis, Total Quality Management in Education(Routledge, 2000: 24
2. Faridah Alawiyah, "Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah", Jurnal Aspirasi Vol. 8 No. 1, Juni 2017.
3. Halik S. Marantingdkk, "Implementasi Standar Nasional Pendidikan Dalam Meningkatkan Daya Saing Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Gorontalo, "TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 8, Nomor 2 : Agustus 2020.
4. <https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/sistem-pendidikan-nasional-dan-permasalahannya/>
5. <https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/sistem-pendidikan-nasional-dan-permasalahannya/>

6. https://www.kompasiana.com/heryizkak7272/5e0eb672d541df4d837854f3/beberapa-masalah-besar-dalam-dunia-pendidikan-di-indonesia?page=all&page_images=1
7. Mardalis. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi. Aksara, 1999); Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, 2005).
8. Muhammad Al Mighwar, "Penyusunan Dan Penyesuaian Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)": [36https://alafkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/157](https://alafkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/157)
9. Novianti. (2015). Peranan Psikologi Pendidikan Dalam Proses. Jupendas, 2(2), 55–60.
10. Pemdiknas RI 19/2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Tersedia online: https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Pendidikan#cite_note-21
11. Rosmayanti, S., Latifah, E. D., & Maulana, A. (2020). Psikologi Pendidikan "Landasan untuk Pengembangan Strategi Pembelajaran". Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
12. Siti Zenab, "Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Di Sekolah Dasar", Jurnal Menata: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. 4 No. 1 (2021)
13. Visi Pendidikan Berbasis Agama, Filsafat, Psikologi dan Sosiologi Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 3 Mei - Juni 2022 927